



Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta



Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu



Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Tahun 2023

Seribu Pulau

Seribu Pesona

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2023 ini merupakan media pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2023 tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat Kepulauan Seribu.

Jakarta, 30 Januari 2024
Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,

Junaedi, M. Si
NIP. 196612051987031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terdapat pencapaian yang membanggakan. Sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Utama berhasil mencapai rata-rata 89,54%, sementara 6 (enam) Kegiatan Strategis Daerah (KSD) memperoleh nilai capaian rata-rata maksimal, yakni 100%. Lebih lanjut, 12 (dua belas) Indikator Sasaran Khusus berhasil mencapai nilai rata-rata sebesar 103,36%, dan 3 (tiga) Indikator Sasaran Operasional mencapai prestasi sempurna dengan capaian 100%. Selain itu, terdapat 14 Program yang secara khusus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama. Menariknya, baik Kegiatan Strategis Daerah, Indikator Sasaran Khusus, maupun Indikator Sasaran Operasional memiliki karakteristik sebagai Indikator-Indikator yang berdiri sendiri, memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung keseluruhan pencapaian kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dalam pelaksanaan keempat belas program tersebut, dana yang dialokasikan mencapai total Rp 213.452.837.790. Realisasi dana tersebut mencapai angka sebesar Rp 202.835.264.485, dengan nilai efisiensi yang mencapai 5,32%. Hal ini menunjukkan ketepatan dan pengelolaan yang efisien dalam alokasi dana, sekaligus menekankan komitmen untuk

memastikan pemanfaatan anggaran dengan optimal dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan setiap program yang dijalankan.

Adapaun kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan ketiga IKU tersebut di atas yang pertama Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi yaitu Kualitas Layanan yang tidak Konsisten dan Ketidakseimbangan Fasilitas dan Infrastruktur. IKU yang kedua Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi kendalanya adalah Kurangnya Komunikasi dan Informasi. IKU yang ketiga Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dengan kendala Keterbatasan sumber daya manusia, keempat Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan kendalanya adalah Tidak memberikan edukasi atau sosialisasi yang cukup kepada masyarakat mengenai pelimpahan kewenangan dapat menyulitkan pemahaman mereka terhadap perubahan tersebut. Adapun untuk kendala-kendala pada Indikator KSD, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1 Kendala-kendala pada Indikator KSD, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional dalam Implementasi Program Tahun 2023

Nama Indikator	Kendala	Faktor Keberhasilan
KSD		
1. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Keterbatasan Anggaran	Partisipasi Aktif Masyarakat
2. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas	Perubahan Kondisi	Koordinasi Antar

Nama Indikator	Kendala	Faktor Keberhasilan
Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Alam atau Bencana	Lembaga yang Baik
3. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	Kurangnya Kesadaran Masyarakat	Koordinasi Antar Lembaga yang Efektif
4. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya AKIP	Komunikasi Efektif
5. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Ketidakseimbangan Keterampilan dan Kebutuhan	Investasi dalam Pelatihan dan Pengembangan
6. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	Akses Terbatas terhadap Pembiayaan	Pelatihan dan Dukungan Pengembangan Kapasitas
Indikator Sasaran Khusus		
1. Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Tantangan Teknologi dan Media Sosial	Penyusunan Pesan yang Jelas dan Konsisten
2. Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Kompleksitas Data yang Tinggi	Pelatihan dan Pemahaman yang Baik
3. Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau	Kompleksitas Sertifikasi TKDN	Ketersediaan barang dan Kualitas Produk Dalam Negeri yang

Nama Indikator	Kendala	Faktor Keberhasilan
produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri		cukup
4. Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Kompleksitas Proses Evaluasi dan Audit	Peningkatan Kualitas Data dan Informasi
5. Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Tingkat Keberlanjutan yang Rendah	Partisipasi Pegawai dan Tim Pengelola Arsip
6. Persentase Pemanfaatan E-Order	Kegiatan yang dilaksanakan mendadak	Kebijakan yang Jelas dan Dukungan Hukum
7. Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	Ketidakpastian Data dan Dokumentasi Awal	Keterlibatan Penuh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang
8. Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Akses server yang sulit pada waktu pelaksanaan	Partisipasi dan Keterlibatan Penuh ASN
9. Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman	Sistem Pengukuran Kinerja yang Efektif
10. Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman	Komitmen Pemimpin dan Manajemen
11. Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Tingkat partisipasi dan keterlibatan pihak terkait dalam implementasi program atau proyek rendah, hal ini dapat mempengaruhi nilai kinerja anggaran.	Monitoring dan Evaluasi Berkala

Nama Indikator	Kendala	Faktor Keberhasilan
12. Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR mengalami kesulitan dalam menggunakan atau memahami teknologi yang digunakan untuk penginputan data	Dukungan Teknis yang Tersedia
Sasaran Operasional		
1. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Keterbatasan Sumber Daya	Pengaturan Tindak Lanjut yang Jelas
2. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Tingkat pemahaman yang rendah terhadap peraturan penyelesaian aduan	Koordinasi dengan Tim yang efektif dan efisien
3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Kompleksitas dalam penyelesaian Tindak Lanjut arahan Gubernur	Koordinasi dengan Tim yang efektif dan efisien

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	xvi
Bab 1 : Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Dasar Hukum	3
Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	4
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	5
Tugas dan Fungsi	8
Aspek Strategis	9
Bab 2 : Perencanaan Kinerja Tahun 2022	12
Pernyataan Visi	12
Rencana Strategis.....	13

Perjanjian Kinerja	15
Tujuan dan Sasaran.....	21
Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja	24
Capaian Kinerja	24
Analisa Capaian Kinerja.....	63
Pengaruh Capaian Kinerja terhadap Budaya Organisasi.....	88
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	89
Program/Kegiatan Strategis Yang Menunjang Keberhasilan	99
Realisasi Anggaran	106
Bab 4 : Penutup	107
Kesimpulan	108
Saran	110
Tindak Lanjut.....	111
Lampiran-lampiran.....	112



BAB

1

Pendahuluan

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik / *good governance*. *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan publik *goods and services* dimana praktek terbaiknya disebut *good governance*. Agar *good governance* dapat diwujudkan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good governance* menuntut koordinasi yang baik dan profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Instansi Pemerintah memiliki tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik/ stakeholder) Kepulauan Seribu. Secara periodik pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan hasil atas kinerja yang telah dilaksanakannya selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja diharapkan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Masyarakat Kepulauan Seribu mengharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Penambahan anggaran yang dikeluarkan dari tahun-ketahun, harus dapat menjamin tingginya kepuasan

masyarakat atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan ataupun disediakan oleh pemerintah. Mekanisme pengukuran kinerja dengan penekanan pada kemampuan menyerap anggaran sudah tidak ideal lagi saat ini apabila dibandingkan dengan hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dimana pada kenyataannya masih berada jauh di bawah tingkat yang diinginkan.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengukur semua pprogram satuan kerja tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau manfaat dan dampak dari program tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pejabat dan staf serta partisipasi masyarakat.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023 adalah sebagai media untuk mendapatkan masukan stakeholder dengan memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Melalui identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Sehingga laporan kinerja dapat menjadi proses evaluasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Pergub Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu terdiri atas gugusan pulau - pulau kecil yang berjumlah 110 pulau dengan luas daratan 871,23 ha. Dari 110 pulau, hanya 11 pulau yang berpenduduk, sementara 98 pulau lainnya merupakan pulau tidak berpenduduk yang berupa pulau milik pribadi, resort, cagar alam, wisata bahari, dan lain –lain.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2001 tentang pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Geografis

Kepulauan Seribu secara geografis terletak antara 106°25' – 106°4'BT dan 5°24' – 5°45'LS dengan Luas wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu luas wilayah 871,23 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut Jawa
- Sebelah Utara Laut Jawa
- Sebelah Selatan Kecamatan Cengkareng, Penjaringan, Tanjung Priok, Koja dan Tangerang Barat
- Sebelah Barat Laut Jawa dan Selat Sunda

Topografis

Wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagian besar terdiri dari perairan / lautan dan gugusan pulau - pulau kecil yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 2 meter di atas permukaan laut, luas daratan terutama di sepanjang pantai.

Wilayah Administratif

Secara administratif, wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terbagi menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu: Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Serta terdapat 6 (enam) kelurahan yaitu: Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari, Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan.

Sejalan dengan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah, saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdapat 13 (tiga belas) suku dinas, 3 (tiga) suku badan, 4 (empat) unit pelayanan/penyelenggara/pengelola dan 3 (tiga) instansi vertikal.

Penduduk

Jumlah penduduk Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkisar 30.212 jiwa lebih dengan tingkat kepadatan rata-rata mencapai 2.962 jiwa per km². Jika dilihat dari tingkat penyebarannya, yang tertinggi terdapat di Kecamatan Seribu Utara dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Seribu Selatan dari total penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Dalam rangka menata organisasi di Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini, maka disusun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kabupaten Administrasi merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintahan Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi, dipimpin oleh seorang Bupati yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah. Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah dan Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Kabupaten Administrasi melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur dan selain itu dalam melaksanakan tugas tambahan SKPD di Kabupaten Administrasi berpedoman kepada arahan dan kebijaksanaan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Kabupaten Administrasi terdiri dari :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretariat Kabupaten, terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Pemerintahan
 2. Sub Bagian Tata Praja dan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - b) Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian, terdiri dari:
 2. Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan terdiri dari :
 - a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Tata Usaha dan Protokol
 - 2) Subbagian Rumah Tangga
 - 3) Subbagian Perlengkapan.

- b) Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Keuangan.
 - c) Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
- 3. Unit Kerja Teknis 1, terdiri dari:
 - a) Seksi Sosial
 - b) Seksi Pemuda dan Olahraga
 - c) Seksi Perpustakaan dan Kearsipan
- 4. Unit Kerja Teknis 2, terdiri dari:
 - a) Seksi Pencahayaan Kabupaten
 - b) Seksi Pertamanan dan Hutan Kota
 - c) Seksi Bina Marga
- 5. Kecamatan, terdiri dari:
 - a) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum
 - 2) Subbagian Program dan Anggaran
 - 3) Subbagian Keuangan
 - b) Seksi Pemerintahan
 - c) Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - d) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - e) Kelurahan, terdiri dari
 - 1) Lurah
 - 2) Wakil Lurah
 - 3) Sekretariat Kelurahan
 - 4) Seksi Pemerintahan
 - 5) Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - 6) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dipimpin oleh Bupati mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi;
- b. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Administrasi;
- c. memimpin, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabupaten, Unit Kerja Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
- d. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kabupaten Administrasi;
- e. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten Administrasi; dan
- f. mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/ UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi.

Aspek Strategis

Adapun dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tidak lepas dari berbagai permasalahan dan kendala, antara lain:

1. Keterbatasan dana dapat menjadi kendala utama dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, terutama jika program tersebut memerlukan investasi besar.
2. Risiko perubahan kondisi alam atau bencana dapat memberikan hambatan serius terhadap keberlanjutan infrastruktur dan perumahan di suatu daerah;

3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program peningkatan kualitas perkotaan dapat menghambat kesuksesan implementasi proyek;
4. Kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pegawai pemerintah terkait pentingnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bisa menjadi hambatan;
5. Tantangan dalam menyesuaikan keterampilan dan kebutuhan profesionalisme pegawai dengan tuntutan dan perkembangan dunia kerja yang terus berubah;
6. Keterbatasan akses UMKM terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan dapat menjadi kendala serius dalam memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas produksi;



BAB 2 Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Pernyataan Visi

Sebagai pemberi arah dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu ditetapkan bersama suatu pandangan ke depan (*vision*) yang akan menjadi sumber motivasi dan inovasi dinamis dalam mewujudkan berbagai bentuk pelayanan publik yang prima. Gambaran ke depan yang dimaksud dirumuskan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Visi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah :

“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua”

Sebagai suatu lembaga pemerintah yang merupakan perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu membawa visi Gubernur yang ketiga yaitu Kesejahteraan Bagi Semua. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua masyarakat, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya, serta peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengemban misi sebagai berikut:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Rencana Strategis

Perjanjian kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat antara Bupati dengan Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan bersama dalam jangka waktu tertentu. Dalam perjanjian ini, Bupati bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam perjanjian. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, serta untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Selanjutnya dalam perjanjian kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdapat 9 sasaran strategis dengan Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan dengan Target nilai 88,5
2. Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi dengan Target nilai 85
3. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi dengan Target nilai 87,33
4. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan target nilai 100%
5. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan target nilai 100%
6. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati dengan target nilai 100%
7. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target nilai 100%
8. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta dengan target nilai 100%
9. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM dengan target nilai 100%

Indikator Kinerja yang pelaksanaannya tidak bergantung pada ketersediaan anggaran maka apabila anggarannya tidak dapat dicairkan atau tanpa anggaran sekalipun namun masuk dalam perjanjian kinerja maka masih tetap dapat diukur *output* dan *outcomenya*. Target kinerja yang realisasinya tidak bergantung pada ketersediaan anggaran mayoritas besar merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya bersifat koordinatif.

Perjanjian Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun Perjanjian Kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja ini kemudian dilakukan dibuat Penetapan Perjanjian Kinerja yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam suatu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja 2023 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk Tahun 2023.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Indikator Strategis			
1	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	87,33
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan	88,5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Kelurahan	
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	85
4	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100%
5	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	100%
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptibilitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	100%
7	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	100%
8	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	
9	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%
Indikator Khusus			
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	3
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	100%
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	82
14	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
15	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100%
16	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92
17	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	100%
18	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	100%
19	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	100%
20	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	
21	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	100%
22	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%
23	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%
24	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	100%
Indikator Operasional			
25	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%
26	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%
27	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%

Tabel 2.2 Program dan Pagu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No	Nama Program	Pagu
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.23,571,232,196
2	Program Penanganan Bencana	Rp.324,549,392
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.11,496,522,688
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.722,429,662
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp.443,708,146
6	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.1,130,819,814
7	Program Pengelolaan Arsip	Rp.27,363,520
8	Program Kepegawaian Daerah	Rp.39,000,000
9	Program Pengelolaan Kecamatan	Rp.38,987,568,750
10	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Rp.934,203,251
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.127,154,187,672
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Rp.600,792,118
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.7,564,771,624
14	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.455,688,957

Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah :

***“Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya
yang Memberikan Layanan Publik dan
Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal”***

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.



Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi pengukuran program dan kegiatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk periode 2023-2026. Gambaran lebih lanjut mengenai keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun			
			2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	87,33	87,33	88,13	88,70
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan	Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	85	86	87	88,5

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun			
			2023	2024	2025	2026
	Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	88,5	88,6	88,7	88,8
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	88,5	88,6	88,7	88,8



BAB 3

Data Capaian Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja yang disajikan dalam bagian ini menjelaskan tentang capaian indikator kinerja organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdapat 46 (Empat puluh enam) sasaran kinerja yang terbagi menjadi sasaran strategis, sasaran operasional dan sasaran khusus. Sasaran strategis memuat Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan, Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi, Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi dan KSD yang diampu oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sasaran Khusus memuat Pemanfaatan E-Order, Opini Laporan Keuangan Daerah, Strategi Komunikasi, Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif, progress pengumpulan data sesuai daftar data, Survei Kepuasan Layanan Masyarakat, Persentase Inventarisasi BMD, kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR, Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN, Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan, Penerapan Manajemen Risiko, Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi dan Predikat SAKIP. Sedangkan untuk Sasaran Operasional memuat Penyelesaian Tindak Lanjut Arahkan Gubernur, Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan Masyarakat, Nilai Survey Kepuasan Layanan Masyarakat, Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK.

Tabel berikut akan membandingkan data capaian kinerja di Tahun 2023 dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, juga membandingkannya dengan target RPJMD 2021-2022 serta membandingkannya dengan capaian kabupaten lain di Indonesia yaitu Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan adanya perbandingan ini akan memperjelas posisi capaian yang ada di Tahun 2023 dan memberi informasi mengenai trend dari kondisi capaian beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja, Realisasi dan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan Bidang unsur Kabupaten Administrasi	87,33	89,02	N/A	N/A	N/A
2	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey	87,33	89,02	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Kecamatan Administrasi					
3	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Kota Administrasi	87,33	89,02	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Kesatuan Bangsa dan Politik	87,33	89,02	N/A	N/A	N/A
5	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten	87,33	93,83	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur kepemudaan dan olahraga					
6	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Perpustakaan	87,33	89,02	N/A	N/A	N/A
7	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan	87,33	89,02	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Kearsipan					
8	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Kepegawaian	87,33	89,02	N/A	N/A	N/A
9	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap	87,33	89,02	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Optimal		layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
10	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Sosial	87,33	89,02	N/A	N/A	N/A
11	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi	87,33	89,02	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Lingkungan Hidup					
12	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun	88,5	95,52	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Bidang unsur Kecamatan Administrasi					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	Hasil pengukuran terhadap efektifitas koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta administrasi dan kesejahteraan rakyat	85	87,25	N/A	N/A	N/A
14	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	Hasil pengukuran terhadap efektifitas koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta administrasi dan kesejahteraan rakyat	85	87,25	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan	88,5	88,7	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik					
16	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan	88,5	93,83	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Unsur Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
17	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei	88,5	91,07	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal		kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Unsur Perpustakaan					
18	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan	88,5	98,76	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Unsur Kearsipan					
19	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara	88,5	87,30	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			a pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Unsur Kepegawaian					
20	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan	88,5	81,53	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Pelimpahan Kewenangan	kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
21	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan	88,5	97,28	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Unsur Bidang Sosial					
22	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan	88,5	81,34	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Unsur Bidang Lingkungan Hidup					
23	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100%	100%	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	100%	100%	N/A	N/A	N/A
25	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	100%	100%	N/A	N/A	N/A
26	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	100%	100%	N/A	N/A	N/A
27	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan	100%	100%	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman					
28	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	100%	100%	100%	100%
29	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini	3	3	3	3	3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))					
30	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.)	100%	100%	100%	88,41%	N/A
31	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi	100%	100%	100%	100%	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.					
32	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	82	89,05	91	94,22	91
33	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Terselesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK).Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon III/Setara.Unit Pengolah adalah satuan kerja	100%	100%	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro UmumDasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.2.					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis					
34	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah	100%	100%	N/A	N/A	N/A
35	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing	92	95,52	97,62%	89,81	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang selesai diinventarisasi adalah : 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code.	100%	100%	N/A	N/A	N/A
37	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah	Persentase penyelesaian penginputan	Jumlah BAST (Berita Acara Serah Terima)	100%	100%	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IP PR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	Tahun 2017-2022 yang selesai diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100%					
38	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa	80%	87,42%	N/A	N/A	N/A
39	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Implementasi Pengembangan	Terselesainya Pemenuhan pengembangan	100%	100%	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	n Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta					
40	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Terselesainya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%	N/A	N/A	N/A
41	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan	Terselesainya Penyelesaian Tahapan	50%	50%	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		manajemen pengetahuan	manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id					
42	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai)1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko.2. Unit Kepatuhan	100%	100%	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko. Formula Pengukuran :[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%Output Sasaran:1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal;3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;5. Dokumen Formulir penanganan					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Risiko.Metode Pengukuran :Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal 2. Dokumen Formulir profil dan peta RisikoTriwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan RisikoMetode Pengukuran :Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan InternalTriwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta RisikoTriwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan RisikoSumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat					
43	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi	71%	95,83%	93,41%	92,23%	91%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e-SAKIP 2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output)					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kegiatan. Sumber Data : a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik					
44	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	N/A
45	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	N/A
46	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti	25%	25%	100%	100%	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)					

Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi dengan unsur Kabupaten Administrasi mencakup sejumlah faktor yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administratif di suatu kabupaten. Ini dapat mencakup responsivitas pelayanan, ketersediaan informasi, efisiensi proses administratif, dan kejelasan aturan. Indeks ini membantu menilai sejauh mana kebijakan dan praktik administratif dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 89,02 sedangkan targetnya 87,33 sehingga capaiannya 101,93% .

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

2. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang Unsur Kecamatan Administrasi

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi dengan unsur Kecamatan Administrasi mencakup sejumlah faktor yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administratif di suatu kabupaten. Ini dapat mencakup responsivitas pelayanan, ketersediaan informasi, efisiensi proses administratif, dan kejelasan aturan. Indeks ini membantu menilai sejauh mana kebijakan dan praktik administratif dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 89,02 sedangkan targetnya 87,33 sehingga capaiannya 101,93% .

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

3. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kota Administrasi

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi dengan unsur Kota Administrasi mencakup sejumlah faktor yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administratif di suatu kabupaten. Ini dapat mencakup responsivitas pelayanan, ketersediaan informasi, efisiensi proses administratif, dan kejelasan aturan. Indeks ini membantu menilai sejauh mana kebijakan dan praktik administratif dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 89,02 sedangkan targetnya 87,33 sehingga capaiannya 101,93% .

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

4. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Administrasi

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Administrasi mencakup evaluasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam memelihara persatuan, kerukunan, dan stabilitas politik di wilayahnya. Ini mencakup penilaian terhadap kebijakan yang mendukung keberagaman, partisipasi masyarakat dalam proses politik, serta efektivitas pemerintah dalam menanggulangi potensi konflik atau ketegangan politik di tingkat lokal. Indeks ini memberikan gambaran tentang dampak kebijakan administratif terhadap integrasi sosial dan politik di suatu kabupaten.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 89,02 sedangkan targetnya 87,33 sehingga capaiannya 101,93% .

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kesatuan Bangsa dan Politik Administrasi.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

5. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kepemudaan dan Olahraga

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur

Kepemudaan dan Olahraga mencakup evaluasi terhadap kebijakan dan layanan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan partisipasi pemuda serta pengembangan kegiatan olahraga di kabupaten tersebut. Ini mencakup aspek-aspek seperti penyelenggaraan kegiatan olahraga, fasilitas olahraga, program pembinaan pemuda, dan dukungan terhadap kegiatan positif yang melibatkan kaum muda. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana kebijakan administratif dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pemuda serta mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan olahraga..

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 89,02 sedangkan targetnya 87,33 sehingga capaiannya 101,93% .

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kepemudaan dan Olahraga.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

6. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Perpustakaan

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Perpustakaan mencakup penilaian terhadap ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan perpustakaan di suatu kabupaten. Ini melibatkan evaluasi terhadap koleksi buku, fasilitas fisik, layanan informasi, serta inisiatif untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui perpustakaan. Indeks ini membantu mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya informasi dan mendukung pengembangan literasi di kalangan penduduk setempat.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 89,02 sedangkan targetnya 87,33 sehingga capaiannya 101,93% .

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Perpustakaan.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

7. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kearsipan

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kearsipan melibatkan evaluasi terhadap efisiensi, keterbukaan, dan ketersediaan arsip publik. Ini mencakup penilaian terhadap pengelolaan dokumen dan data, sistem penyimpanan, serta kemudahan akses bagi Pegawai untuk mendapatkan informasi arsip. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menjaga transparansi, akuntabilitas, dan ketersediaan informasi arsip yang dapat mendukung kebutuhan administratif dan kepentingan publik..

- Realisasi Capaian vs Target
Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 89,02 sedangkan targetnya 87,33 sehingga capaiannya 101,93% .
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kearsipan.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

8. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kepegawaian

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kepegawaian mencakup evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pemerintah daerah. Ini melibatkan penilaian terhadap responsivitas, keprofesionalan, dan sikap pelayanan dari aparatur sipil negara di tingkat kabupaten. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana kebijakan

dan praktik kepegawaian mendukung terciptanya layanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat..

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 89,02 sedangkan targetnya 87,33 sehingga capaiannya 101,93% .

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kepegawaian.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

9. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melibatkan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan terkait pembangunan infrastruktur, tata ruang, dan penataan wilayah di suatu kabupaten. Ini mencakup penilaian terhadap kualitas pembangunan jalan, drainase, taman kota, serta perencanaan perkotaan. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana kebijakan administratif dapat menciptakan lingkungan fisik yang nyaman, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat..

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 89,02 sedangkan targetnya 87,33 sehingga capaiannya 101,93% .

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

10. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Lingkungan Hidup melibatkan evaluasi terhadap kebijakan dan upaya pemerintah daerah dalam menjaga, melindungi, dan meningkatkan kualitas lingkungan di kabupaten tersebut. Ini mencakup penilaian terhadap program perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, keberlanjutan sumber daya alam, dan inisiatif pelestarian alam. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana pemerintah daerah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terkait lingkungan hidup dan keberlanjutan..

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 89,02 sedangkan targetnya 87,33 sehingga capaiannya 101,93% .

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Lingkungan Hidup.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

11. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

Indikator kinerja ini membantu mengukur sejauh mana pelayanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Evaluasi yang teratur terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang efektivitas program dan kebijakan pemerintah setempat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan.

12. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 95,52 sedangkan targetnya 88,5 sehingga capaiannya 101,93% .
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.

13. Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi

Pengukuran Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi melalui indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja dan efektivitas koordinasi antarunit atau lembaga pemerintah di tingkat kabupaten. Evaluasi terhadap indeks ini penting untuk meningkatkan efisiensi, mengatasi hambatan, dan memastikan tujuan bersama dapat dicapai dengan baik.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 87,25 sedangkan targetnya 85 sehingga capaiannya 102,64% .
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.

14. Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi

Pengukuran Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi melalui indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja dan efektivitas koordinasi antarunit atau lembaga pemerintah di tingkat kabupaten. Evaluasi terhadap indeks ini penting untuk meningkatkan efisiensi, mengatasi hambatan, dan memastikan tujuan bersama dapat dicapai dengan baik.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 87,25 sedangkan targetnya 85 sehingga capaiannya 102,64% .

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.

15. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik

Indeks Kepuasan Masyarakat ini membantu mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh unsur Kesatuan Bangsa dan Politik memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terkait dengan fungsi dan tanggung jawab mereka. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan serta membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 88,7 sedangkan targetnya 88,5 sehingga capaiannya 100,22% .

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.

16. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Kepemudaan dan Olahraga

Pengukuran dilakukan dengan Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat yang masuk.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 93,83 sedangkan targetnya 88,5 sehingga capaiannya 106% .

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Kepemudaan dan Olahraga.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.

17. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Perpustakaan

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Perpustakaan membantu mengukur sejauh mana pelayanan perpustakaan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan wawasan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut. Evaluasi secara teratur terhadap indikator-indikator ini dapat membantu perpustakaan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengaruh positifnya dalam mendukung pendidikan dan pembangunan komunitas.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 91,07 sedangkan targetnya 88,5 sehingga capaiannya 102,90%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Perpustakaan.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.

18. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Kearsipan

- Realisasi Capaian vs Target
Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 87,30 sedangkan targetnya 88,5 sehingga capaiannya 98,64%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.

19. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Kepegawaian.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Kepegawaian membantu mengukur sejauh mana kebijakan dan praktik kepegawaian memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepegawaian serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem kepegawaian yang ada.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 87,30 sedangkan targetnya 88,5 sehingga capaiannya 98,64%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Kepegawaian.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.

20. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membantu mengukur sejauh mana pelayanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas dan relevansi kebijakan dan proyek yang dilaksanakan oleh unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 81,53 sedangkan targetnya 88,5 sehingga capaiannya 92,12%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.

21. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Bidang Sosial.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Bidang Sosial membantu mengukur sejauh mana layanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas dan relevansi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh unsur Bidang Sosial serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 97,28 sedangkan targetnya 88,5 sehingga capaiannya 109,92%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Bidang Sosial.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.

22. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Bidang Lingkungan Hidup.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Bidang Lingkungan Hidup membantu mengukur sejauh mana layanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas dan relevansi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh unsur Bidang Lingkungan Hidup serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 81,34 sedangkan targetnya 88,5 sehingga capaiannya 91,90%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat nilai Indeks Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Bidang Lingkungan Hidup.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu juga tidak terdapat nilai Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.

23. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta.

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

24. Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial.

Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat KSD Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

25. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM.

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

26. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati.

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

27. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya tidak terdapat KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

28. Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja KSD, renaksi tiap tahunnya berbeda-beda. Pada capaian tahun 2022 dan 2021, indikator ini capaiannya juga 100%

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

29. Opini laporan Keuangan.

Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2022 dan 2021, indikator ini capaiannya juga 100% dengan diperolehnya WTP oleh tingkat Provinsi DKI Jakarta.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

30. Persentase Pemanfaatan E-Order.

Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.).

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2022 capaiannya 100% dan 2021 indikator ini capaiannya juga 88,41%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

31. Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik

Pengukuran persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh dokumen yang menjadi data pendukung tercapainya pelaksanaan Strategi Komunikasi Publik telah dibuat dan diupload kedalam sistem tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2021, indikator ini capaiannya juga 100%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

32. Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Pengukuran dilakukan dengan perolehan Nilai/Predikat minimal A dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target nilai untuk tahun 2023 adalah 82, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu berhasil mendapatkan nilai 89,05. Seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 108,59%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini Tahun 2022 berhasil mendapatkan nilai 91.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

33. Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif

Terselesaikanya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK)..

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target nilai untuk tahun 2023 adalah 100%, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu berhasil mendapatkan nilai 100%. Seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini Tahun 2022 dan 2021 tidak terdapat Indikator Kinerja Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

34. Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada indikator ini target nilai untuk tahun 2023 adalah 100%, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu berhasil mendapatkan nilai 100%. Seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada indikator kinerja ini Tahun 2022 dan 2021 tidak terdapat Indikator Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

35. Survei Kepuasan Layanan Masyarakat

Pengukuran dilakukan dengan menghitung hasil jawaban pada kuesioner Jaksurvey dari para responden yang telah ditentukan sebelumnya. Responden berasal dari para ketua RT, ketua RW, LMK, FKDM, Forkopimda, TP-PKK dan lainnya pada setiap masing-masing tingkatan wilayah.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada indikator ini target untuk tahun 2023 adalah 92 dan realisasinya adalah 95,52 sehingga capaiannya 103,82%. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu kegiatan pada Tahun 2023 seluruh kegiatan pelayanan telah berjalan normal dan masyarakat mendapatkan pelayanan dengan baik.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2022, indikator ini realisasinya juga 97,62.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

36. Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD

Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2023 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022, tidak terdapat Indikator Kinerja Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

37. Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU

Jumlah BAST (Berita Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 yang selesai diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100%.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2023 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022, tidak terdapat Indikator penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

38. Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri

Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)². Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2023 adalah 80% dan realisasinya adalah 87,42% sehingga capaiannya 109,27%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022, tidak terdapat Indikator Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

39. Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun.

Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2023 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022, tidak terdapat Indikator Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

40. Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun.

Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2023 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022, tidak terdapat Indikator Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

41. Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan.

Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <https://km-bpsdm.jakarta.go.id>.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2023 adalah 50% dan realisasinya adalah 50% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun 2022, tidak terdapat Indikator Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

42. Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.

Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada indikator ini target untuk tahun 2023 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun 2022, tidak terdapat Indikator Kinerja Penerapan Manajemen Risiko.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

43. Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi.

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada indikator ini target untuk tahun 2023 adalah 71% dan realisasinya adalah 95,83% sehingga capaiannya 134,97%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun 2022, realisasi mencapai 93,41%.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

44. Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur.

Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada indikator ini target untuk tahun 2023 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun 2022, realisasi mencapai 100%.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

45. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat.

Pengukuran dilakukan dengan Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat yang masuk.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada tahun 2023, jumlah aduan yang masuk sebanyak 41 aduan. Seluruh aduan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang sesuai dengan aturan yang ada. Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2022 indikator ini capaiannya juga 100%.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

46. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya /

jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat).

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2023 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022, realisasi mencapai 100%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

Selain itu untuk memperkuat data realisasi perbandingan capaian, maka berikut disajikan perbandingan capaian dengan kabupaten lain di Indonesia untuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian IKU dengan Daerah lain

Indikator Kinerja Utama	Capaian		
	Kabupaten Adm. Kep. Seribu	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Garut
Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten	89,80	N/A	N/A
Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	87,25	N/A	N/A
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	91,29%	N/A	N/A
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	90,87%	N/A	N/A

Pada Tabel di atas disajikan data perbandingan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Garut di mana kedua Kabupaten tersebut tidak memiliki Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten, Indeks

Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Tahun 2023. Untuk Capaian Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Tahun 2023 merupakan agregasi dari Indeks Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten, Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan.

Pengaruh Capaian Kinerja terhadap Budaya Organisasi

Capaian kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Capaian kinerja yang baik dapat memiliki pengaruh positif pada budaya kinerja organisasi. Beberapa pengaruh dari capaian kinerja terhadap budaya kinerja organisasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan rasa percaya diri dan kepuasan kerja. Capaian kinerja yang baik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja karyawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap organisasi.
2. Menciptakan budaya kerja yang positif. Capaian kinerja yang baik dapat menciptakan budaya kerja yang positif di mana karyawan merasa bahwa mereka berada di tempat yang tepat dan bahwa kerja mereka dihargai.
3. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Capaian kinerja yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat di mana karyawan merasa aman dan dihargai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja.
4. Menciptakan budaya inovatif. Capaian kinerja yang baik dapat menciptakan budaya di mana karyawan merasa diuntungkan dengan mencari cara baru untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga meningkatkan inovasi dan kreativitas.
5. Menciptakan budaya keterbukaan dan transparansi. Capaian kinerja yang baik dapat menciptakan budaya di mana karyawan merasa diuntungkan dengan berbagi

informasi dan berkomunikasi dengan baik, sehingga meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam organisasi.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya memaksimalkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terdapat tiga komponen sumber daya yang menjadi faktor utama yakni sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya anggaran.

Adapun sumber daya manusia dan sumber daya teknologi yang dilaksanakan oleh IKU Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten berupa :

1. Melakukan kerja kolaboratif antar PIC Internal Kelurahan dengan mendorong dan melakukan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat terkait;
2. Penggunaan aplikasi Jaksurvei dalam pelaksanaan Survei yang memudahkan dalam memonitoring secara *real time*.

Kemudian Efisiensi sumber daya manusia dan sumber daya teknologi yang dilaksanakan oleh IKU Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi berupa :

1. Membentuk tim yang terstruktur dengan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi antar anggota tim;
2. Menggunakan aplikasi dan platform kolaboratif untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi antar tim dan unit kerja.

Selanjutnya Efisiensi sumber daya manusia dan sumber daya teknologi yang dilaksanakan oleh IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan berupa :

1. Memberikan pelatihan yang sesuai untuk petugas layanan kemasyarakatan guna meningkatkan keterampilan interpersonal, pengetahuan, dan kemampuan mereka dalam memberikan layanan yang berkualitas;
2. Menyediakan layanan kemasyarakatan melalui platform digital, termasuk pendaftaran online, pemantauan proyek, dan umpan balik masyarakat, untuk mempermudah akses dan penggunaan layanan.

Dan yang terakhir Efisiensi sumber daya manusia dan sumber daya teknologi yang dilaksanakan oleh IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan berupa :

1. Membentuk tim responsif yang dapat dengan cepat menanggapi keluhan dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan;
2. Menerapkan analisis data untuk mengevaluasi hasil survei kepuasan masyarakat, mengidentifikasi area perbaikan, dan merumuskan rencana tindak lanjut yang efektif.

Dalam mencapai targetnya seluruh IKU juga memiliki rencana aksi yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. IKU Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi tidak memiliki rencana aksi, dikarenakan IKU ini merupakan konsolidasi dari 3 IKU dibawah. Perolehan nilainya otomatis dari hasil nilai rata-rata capaian IKU dibawah.
2. IKU Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi memiliki rencana aksi sebagai berikut :
 - a. Pada Fase Perencanaan tersedianya draft kuesioner survei, data calon responden dan flyer digital sosialisasi pelaksanaan survei.
 - b. Fase Pelaksanaan yaitu terlaksananya sosialisasi survei kepada para responden dan pengisian survei oleh para responden
 - c. Fase Monitoring dan Evaluasi yaitu tersedianya hasil pengolahan data pelaksanaan survei, penyusunan laporan survei dan nota dinas pelaksanaan survei dan publikasi nilai survei di media elektronik.
3. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan memiliki rencana aksi sebagai berikut :
 - a. Fase Perencanaan tersedianya draft kuesioner survei, terverifikasinya data calon responden dan tersedianya flyer digital sosialisasi pelaksanaan survei.
 - b. Fase Pelaksanaan terlaksananya sosialisasi survei kepada para responden dan terlaksananya pengisian survei oleh para responden

- c. Fase Monitoring dan Evaluasi Tersedianya hasil pengolahan data pelaksanaan survei, terselesaikannya penyusunan laporan survei dan nota dinas pelaksanaan survei dan tersedianya publikasi nilai survei di media elektronik
4. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan memiliki rencana aksi sebagai berikut :
- a. Fase Perencanaan Tersedianya draft kuesioner survei, terverifikasinya data calon responden dan tersedianya flyer digital sosialisasi pelaksanaan survei
 - b. Fase Pelaksanaan terlaksananya sosialisasi survei kepada para responden
Terlaksananya pengisian survei oleh para responden
 - c. Fase Monitoring dan Evaluasi tersedianya hasil pengolahan data pelaksanaan survei, terselesaikannya penyusunan laporan survei dan nota dinas pelaksanaan survei dan tersedianya publikasi nilai survei di media elektronik.

Adapun Untuk efisiensi Sumber Daya Anggaran disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 14 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Evaluasi Nilai Efisiensi Anggaran menggunakan acuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Untuk menghitung tingkat efisiensi anggaran digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Batas maksimal nilai efisiensi menggunakan rumus ini adalah 20% dan batas minimal -20%. Untuk mengubah nilai Efisiensi ke skala 0-100%, menggunakan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Contoh Perhitungan Nilai Efisiensi untuk Program di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pagu Anggaran = Rp. 213.452.837.790 Realisasi = Rp. 202.835.264.485 capaian keluaran seluruh program 100%.

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{(213.452.837.790 \times 100\%) - 202.835.264.485}{(213.452.837.790 \times 100\%)} \times 100\% \\ &= 5,3\% \text{ (Skala -20\% sampai 20\%)} \end{aligned}$$

Untuk mencari Nilai Efisiensi skala 0-100%, maka

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{4,98\%}{20} \times 50 \\ &= 63,29\% \end{aligned}$$

Tingkat efisiensi dapat dihitung manakala target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak dapat diukur (N/A). Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2023 pada tabel dibawah.

Tabel 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	100%	96.49%	0.035%
2	Program Penanganan Bencana	Terwujudnya Penanganan Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	105,26%	29.12%	0.761%
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	95.28%	0.047%
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	86.65%	0.333%
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	79.87%	0.401%
6	Program Pembinaan Perpustakaan	Terbinanya Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	96.24%	0.238%
7	Program Pengelolaan Arsip	Terkelolanya Arsip Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	93.34%	0.068%
8	Program Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Aktivitas Kepegawaian Daerah Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	116,67%	100.00%	0%

No	Program	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
9	Program Pengelolaan Kecamatan	Terwujudnya Pengelolaan Kecamatan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	97.92%	0.021%
10	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Terwujudnya Pengelolaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	77.98%	0.266%
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	94.25%	0.058%
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	102,63%	76.56%	0.280%
13	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	96.17%	0.038%
14	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	94.50%	0.055%

Penyerapan anggaran pada tabel di atas diperhitungkan berdasarkan penyerapan anggaran Program di mana kegiatan yang mendukung sasaran tersebut berada, atau diperhitungkan secara keseluruhan.

1. Program Penyelenggaraan Jalan

- Kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jalan adalah Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

dengan Subkegiatan Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan berkala Jalan. Program ini memiliki Indikator Sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi.

2. Program Penanganan Bencana

- Kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jalan adalah Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan Subkegiatan Penyediaan Permakanan dan Penyediaan Sandang. Program ini memiliki Indikator Sasaran yaitu Terwujudnya Penanganan Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

- Kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Program Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) adalah Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi dengan Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Program ini memiliki Indikator Sasaran yaitu Terkelolanya Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- Kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan adalah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi dan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera. Program ini memiliki Indikator Sasaran yaitu Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

5. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

- Kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan adalah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan Subkegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi. Program ini memiliki Indikator Sasaran yaitu Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

6. Program Pembinaan Perpustakaan

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Pembinaan Perpustakaan adalah Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi dan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka. Indikator yang berkaitan adalah Terbinanya Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

7. Program Pengelolaan Arsip

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Pengelolaan Arsip adalah Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi dengan Subkegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi dan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi dan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi dengan Subkegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis. Indikator yang berkaitan adalah Terkelolanya Arsip Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

8. Program Kepegawaian Daerah

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Pengelolaan Arsip adalah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN. Indikator yang berkaitan adalah

Terwujudnya Aktifitas Kepegawaian Daerah Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

9. Program Pengelolaan Kecamatan

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Pengelolaan Kecamatan adalah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi, Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten. Indikator yang berkaitan adalah Terwujudnya Pengelolaan Kecamatan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

10. Program Pengelolaan Kota Administrasi

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Pengelolaan Kota Administrasi adalah Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Terwujudnya Pengelolaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator yang berkaitan adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

12. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan adalah Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Kebangsaan. Indikator yang berkaitan adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan,

Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan adalah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Indikator yang berkaitan adalah Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

14. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum adalah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban. Indikator yang berkaitan adalah Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Program dan Kegiatan Strategis Yang Menunjang Keberhasilan

Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdapat 14 (empat belas) program yang menjadi target pelaksanaan. 7 (tujuh) program merupakan sasaran utama yang memiliki Indikator Sasaran RPJMD. Sedangkan 7 (tujuh) lainnya merupakan program pelimpahan kewenangan. Berikut ditampilkan capaian dari masing-masing program yang mendukung capaian IKU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Tabel 3.2 Program Yang Mendukung Pencapaian IKU Perangkat Daerah

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	4 Indeks	4 Indeks	100%	23.571.232.196	22.743.748.290	96,49%
2	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	95%	100%	105,26%	324.549.392	94.493.600	29,12%
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	100%	100%	100%	11.496.522.688	10.954.364.643	95,28%
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi	60%	80%	133,33%	722.429.662	626.000.808	86,65%

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	75%	100%	133,33%	443.708.146	354.396.424	79,87%
6	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	13,5%	16,84%	100%	1.130.819.814	1.088.308.888	96,24%
7	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi	25%	25,03%	100,12%	27.363.520	25.542.000	93,34%
8	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	3 indeks	3 indeks	100%	39.000.000	39.000.000	100%
9	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks	4 indeks	100%	38.987.568.750	38.178.435.834	97.92%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks	4 indeks	100%			
10	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Kabupaten Administrasi	85 Nilai	88,87 Nilai	104,55%	934.203.251	728.446.500	77.98%
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	100%	127.154.187.672	119.837.087.327	94.25%
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik	46,43%	46,43%	100%			
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan,	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	85 Nilai	89,12 Nilai	100%	600.792.118	459.941.500	76.56%

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
	Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	85 Nilai	88,62 Nilai	100%			
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	4 Indeks	4 Indeks	100%	7.564.771.624	7.274.866.271	96.17%
14	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4 indeks	4 Indeks	100%	455.688.957	430.632.400	94.50%

Seluruh Indikator Sasaran tersebut dipantau dan dievaluasi progresnya oleh setiap Unit Kerja dari tingkat Sekretariat sampai dengan Kelurahan yang membidangi urusannya sehingga target bisa tercapai sesuai perencanaan. Dengan menghitung Kinerja Program dan kinerja anggaran kemudian capaian realisasinya dibandingkan dengan target maka didapat efisiensi anggaran sebesar 5,3% di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2023.

Pada Tahun 2023 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga memiliki Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023. Berikut ditampilkan capaian dari masing-masing KSD yang mendukung capaian Perjanjian Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023.

Tabel 3.3 Kegiatan Strategis Daerah yang mendukung Perjanjian Kinerja Bupati

No	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Pelaksanaan koordinasi lintas sektor untuk penanganan wilayah kantong-kantong kemiskinan di lingkup kota/kabupaten	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	1. Penyiapan Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A

No	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	2. Penataan RW kumuh sebagai pilot project Penataan Kawasan	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
		3. Implementasi Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
4	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
		2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
		3. Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
		4. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
5	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD	1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A

No	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023				N/A	N/A	N/A
6	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	Sosialisasi Program Pengembangan UMKM di Kelurahan	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan Tabel Kegiatan Strategis Daerah di atas menunjukkan bahwa seluruh Kegiatan Strategis Daerah (KSD) telah berhasil mencapai target 100%. Keberhasilan ini dapat diatribusikan kepada dukungan yang konsisten dan sinergis dari seluruh Unit Kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Sinergi antar unit kerja tersebut menjadi faktor kunci dalam memastikan pencapaian setiap KSD sesuai dengan perjanjian kinerja Bupati. Dengan pencapaian target 100%, hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi yang baik antara berbagai unsur dalam pemerintahan, yang pada gilirannya, berkontribusi pada hasil positif dalam upaya mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini seharusnya menjadi landasan untuk terus mendorong semangat kerjasama dan penguatan sinergi di masa mendatang guna mencapai hasil yang lebih optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan strategis di Kabupaten Administrasi ini.

Realisasi Anggaran

Secara detail, data Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran pada SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	4 Indeks	4 Indeks	100%	23.571.232.196	22.743.748.290	96,49%
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	95%	100%	105,26%	324.549.392	94.493.600	29,12%
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	100%	100%	100%	11.496.522.688	10.954.364.643	95,28%
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi	60%	80%	133,33%	722.429.662	626.000.808	86,65%
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	75%	100%	133,33%	443.708.146	354.396.424	79,87%
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	13,5%	16,84%	100%	1.130.819.814	1.088.308.888	96,24%

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi	25%	25,03%	100,12%	27.363.520	25.542.000	93,34%
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	3 indeks	3 indeks	100%	39.000.000	39.000.000	100%
7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks	4 indeks	100%	38.987.568.750	38.178.435.834	97.92%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks	4 indeks	100%			
7.02.02	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektivitas Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Kabupaten Administrasi	85 Nilai	88,87 Nilai	104,55%	934.203.251	728.446.500	77.98%
7.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	100%	127.154.187.672	119.837.087.327	94.25%
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik	46,43%	46,43%	100%			
7.03.02	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	85 Nilai	89,12 Nilai	100%	600.792.118	459.941.500	76.56%
		Nilai Efektivitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	85 Nilai	88,62 Nilai	100%			
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	4 Indeks	4 Indeks	100%	7.564.771.624	7.274.866.271	96.17%

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4 indeks	4 Indeks	100%	455.688.957	430.632.400	94.50%

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari total 17 Indikator Kinerja Program Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, terdapat 12 Indikator Kinerja Program yang realisasinya mencapai 100% (Predikat Interpretasi Sangat Tinggi). Dan terdapat 5 (lima) indikator kinerja program melebihi target yaitu indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi sebesar 105,26%, Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi sebesar 133,33%, Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi sebesar 133,33%, Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi sebesar 100,12%, Nilai Efektifitas Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Kabupaten Administrasi 104,55%.

Apabila diperhatikan dari realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV, terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja keuangan. Sub kegiatan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dalam mencapai target keluaran (output). Hal ini dapat berpotensi terhadap rendahnya capaian Indikator Program dari Sub Kegiatan tersebut apabila Surat Penyediaan Dana (SPD) sub kegiatannya tidak diterbitkan.

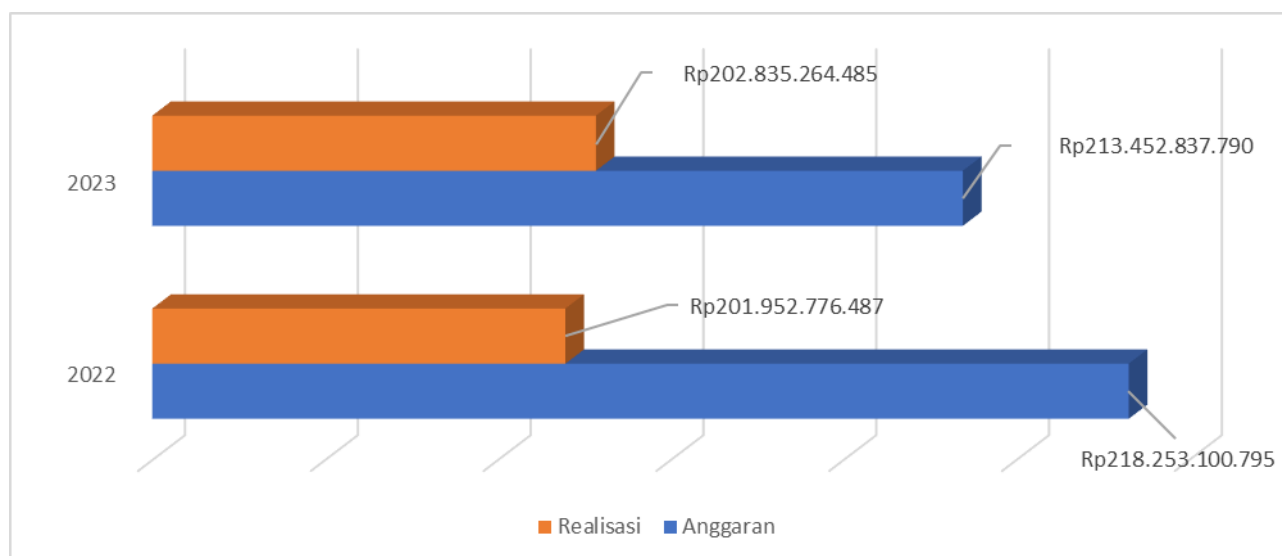
Begitu pula dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat pengadaan, pemeliharaan, pekerjaan fisik, konstruksi, jasa konsultan dan lain-lain, realisasi target kinerja output dan outcome nya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus sebagai prioritas utama dalam penyediaan atau penerbitan dananya (SPD) pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sehingga RENSTRA dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Kemudian terkait program kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya tidak bergantung pada ketersediaan anggaran maka apabila anggarannya tidak dapat dicairkan maka masih tetap dapat menghasilkan output dan outcome. Target kinerja output dan outcome yang realisasinya tidak bergantung pada ketersediaan anggaran mayoritas besar merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya bersifat koordinatif.

Selanjutnya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab potensi tidak tercapainya indikator kinerja program (*outcomes*) dan kegiatan (*output*) sampai dengan akhir periode Renstra 2023-2026 antara lain :

1. Memetakan permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab potensi tidak tercapainya indikator kinerja program (*outcomes*) dan kegiatan (*output*) sampai dengan akhir periode Renstra 2023-2026;
2. Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan pada analisis kebutuhan, data, informasi dan asumsi dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta berdasarkan skala prioritas;
3. Memperhatikan aspek pelaksanaan dan penyerapan atas kegiatan-kegiatan secara maksimal; dan
4. Memperhatikan hal-hal teknis dan administratif setiap kegiatan, anggaran, kode rekening dan komponen belanja yang akan diusulkan dalam Renja.

Pada tahun 2023, anggaran yang diterima ada penurunan dari Tahun 2022 yakni sebesar Rp 213.452.837.790 berikut grafik perbandingannya di bawah ini.



Grafik 3.1. Anggaran dan Realisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022-2023

Berdasarkan Grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2022-2023 mempunyai rata-rata realisasi anggaran sekitar 93,78% persen yang sudah terbilang baik. Meskipun secara persentase realisasi anggaran pada tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2023, namun untuk kedepannya diharapkan dapat lebih tinggi agar target kinerja yang sudah ditetapkan tetap dapat tercapai.



BAB **4** **Penutup**

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2023 dapat disimpulkan secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Program dan kegiatan Tahun 2023 yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Kesimpulan

Dalam rangka mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk tahun 2023, terdapat pencapaian yang sangat memuaskan. Secara keseluruhan, nilai capaian Perjanjian Kinerja mencapai 98,19%, mencerminkan komitmen dan dedikasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian ini terdistribusi merata di seluruh aspek kinerja, di mana empat Indikator Kinerja Utama berhasil mencapai rata-rata 89,80%, dan enam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) mendukungnya dengan capaian rata-rata mencapai 100%. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dari empat belas Indikator Sasaran Khusus, sebagian besar mencapai rata-rata capaian 102,94%, dengan hanya satu indikator yang belum mencapai target 100%, yakni Indikator Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun, yang mencapai 93,53%. Meskipun terdapat sedikit deviasi dari target pada indikator tersebut, pencapaian keseluruhan mencerminkan upaya maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kesuksesan ini seharusnya menjadi landasan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian target di masa yang akan datang.

Adapun faktor kendala-kendala, meskipun Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berhasil meraih pencapaian yang signifikan, beberapa faktor kendala masih dapat diidentifikasi. Beberapa di antaranya melibatkan tantangan yang terkait dengan :

1. Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN: Faktor-faktor seperti keterbatasan waktu dan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam mencapai target 100% pada Indikator Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN;

2. Keterbatasan Sumber Daya: Kendala sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun personel, dapat mempengaruhi kinerja instansi dalam jangka Panjang;
3. Faktor Eksternal: Faktor-faktor eksternal lainnya, seperti kondisi cuaca dan lingkungan kepulauan, dapat memberikan dampak yang tidak terduga pada pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk faktor keberhasilan di sisi lain, beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian tinggi ini melibatkan :

1. Komitmen Pemangku Kepentingan: Dukungan dan komitmen penuh dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, telah menjadi pendorong utama kesuksesan;
2. Manajemen yang Efektif: Pengelolaan sumber daya yang efektif, termasuk alokasi anggaran dan penempatan personel, telah mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal;
3. Kerja Tim dan Sinergi Antar Unit Kerja: Kolaborasi yang erat antar unit kerja dan sinergi yang baik antar tim telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program;
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Keterbukaan dalam pelaporan kinerja dan akuntabilitas atas pencapaian target memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja selama tahun 2023 ini maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan jajarannya telah dapat diselenggarakan dengan baik sebagaimana target kinerja yang ditetapkan.
2. Terlihat upaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung Kabupaten.

3. Beberapa keberhasilan tersebut antara lain dapat terlihat pada peningkatan capaian berbagai indikator kinerja utama apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Untuk mengatasi faktor kendala dan mempertahankan faktor keberhasilan, beberapa langkah dapat diambil ke depannya yaitu :

1. Optimalisasi Sumber Daya dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap alokasi sumber daya, baik finansial maupun personel, untuk memastikan efisiensi penggunaan;
2. Penguatan Program Pengembangan Kompetensi ASN dengan merumuskan strategi lebih lanjut dalam pelaksanaan program pengembangan kompetensi ASN, termasuk peningkatan waktu pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik;
3. Penguatan Manajemen Risiko dengan meningkatkan kapasitas dalam manajemen risiko untuk menghadapi tantangan yang dapat timbul di masa mendatang.

Saran

Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2023, instansi pemerintah setempat telah melakukan langkah proaktif dengan memasukkan berbagai rekomendasi dan hasil evaluasi yang diterima dari Inspektorat diantaranya sebagai berikut :

1. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan;
2. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja;

4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
6. Dalam Upaya perbaikan dan penyempurnaan Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merekomendasikan yaitu :

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka menyempurnakan capaian kinerja pada waktu yang akan datang, maka berikut adalah rekomendasi yang dapat dilakukan berdasarkan pada hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023 :

1. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berdasarkan asas *the right man on the right place*;
2. Membuat rencana aksi untuk setiap indikator kinerja agar dapat melihat progress per triwulan serta mencegah tidak tercapainya indikator kinerja;
3. Rutin melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi setiap indikator kinerja agar capaian dari kinerja bisa maksimal.

Tindak lanjut terhadap saran-saran yang telah diberikan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada LKIP tahun sebelumnya mencakup sejumlah langkah konkret dalam penyempurnaan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yaitu :

1. Dokumen tersebut telah diformalkan, memastikan kejelasan, keterkaitan dan akuntabilitas laporan.
2. Dalam menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja, laporan tidak hanya memberikan gambaran tingkat lokal tetapi juga

merinci pencapaian yang bersifat nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

3. Dokumen laporan kinerja memberikan detail yang komprehensif terkait keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai setiap target kinerja.
4. Kualitas atas pencapaian target juga diberikan, termasuk upaya nyata yang telah dilakukan atau hambatan yang dihadapi.
5. Laporan kinerja menyoroti efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tingkat kinerja yang optimal.
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), identifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi capaian indikator kinerja, monitoring dan melakukan evaluasi periodik.

Lampiran-lampiran

Lampiran-lampiran yang dimasukkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023 merupakan komponen penting yang melengkapi dan mendukung informasi utama dalam laporan. Lampiran ini mencakup berbagai dokumen dan data pendukung, termasuk namun tidak terbatas pada Rekapitulasi Anggaran, Grafik dan Diagram, Surat Keputusan atau Peraturan, Dokumen Evaluasi Kegiatan, Bukti Pelaksanaan Program, Rincian Capaian Indikator Kinerja dan Dokumen Pendukung Lainnya.

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023


**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNAEDI
Jabatan : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

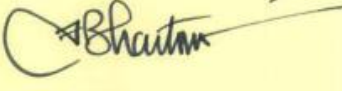
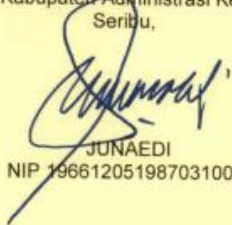
Nama : HERU BUDI HARTONO
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA, Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  HERU BUDI HARTONO	PIHAK PERTAMA, Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,  JUNAEDI NIP. 196612051987031003
--	--

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Junaedi
NIP : 196112151967031003
Jabatan : Bupati
Unit Kerja : Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Terdapatnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemanfaatan Hasil Pembangunan Optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil Indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan METODE PENGUKURAN : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektivitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi SUMBER DATA : Hasil Penhungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Efektivitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	87,33	N/A	87,33	87,33	Nilai
		2	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil Indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan METODE PENGUKURAN : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektivitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur kecamatan administrasi SUMBER DATA : Hasil Penhungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Efektivitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	87,33	N/A	87,33	87,33	Nilai
		3	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	N/A	87,33	N/A	87,33	87,33	Nilai

					DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan. METODE PENGUKURAN : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektivitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi. SUMBER DATA : Hasil Penhungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektivitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei						
		4	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan. METODE PENGUKURAN : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektivitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur kesatuan bangsa dan politik. SUMBER DATA : Hasil Penhungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektivitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	87,33	N/A	87,33	87,33	Nilai
		5	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan. METODE PENGUKURAN : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektivitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga. SUMBER DATA : Hasil Penhungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektivitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	87,33	N/A	87,33	87,33	Nilai
		6	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	N/A	87,33	N/A	87,33	87,33	Nilai

			wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinat Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kemampuan pengurusan pelaksanaan koordinat pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta bidang administrasi, ekonomi, dan pembangunan, dengan responden Kepala UPTD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, dalam rangka mendukung bidang urusan Kabupaten Administrasi. Sumber Data : Hasil Pengetahuan Mandiri (ata-ata) Atlas Hasil Survey Efektivitas Koordinat pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksosui	N/A	88,5	N/A	88,5	88,5	Nilai
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemeliharaan Kewenangan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemeliharaan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah unsur yang dirumuskan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian perspektif sebagai berikut : Nilai Perspeti 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,59; b. Nilai Perspeti 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Perspeti 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 86,30; d. Nilai Perspeti 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 86,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai Interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi ($25 \times \text{Nilai Interval IKM}$) dalam rangka mendukung unsur Keseluruhan Bangsa dan PDRB. Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemeliharaan Kewenangan melalui Jaksosui	N/A	88,5	N/A	88,5	88,5	Nilai
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemeliharaan Kewenangan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemeliharaan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah unsur yang dirumuskan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian perspektif sebagai berikut : Nilai Perspeti 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,59; b. Nilai Perspeti 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Perspeti 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 86,30; d. Nilai Perspeti 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 86,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai Interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi ($25 \times \text{Nilai Interval IKM}$) dalam rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Dan Olahraga Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemeliharaan Kewenangan melalui Jaksosui	N/A	88,5	N/A	88,5	88,5	Nilai

		6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang diimpikan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Ususan Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Olahraga; Ususan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Ususan Pemerintahan Bidang Perputakaan; Ususan Pemerintahan Bidang Keasipaan; Ususan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Ususan Pemerintahan Bidang Sosial Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 54,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,05, atau nilai interval konversi 55,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam rangka mendukung Bidang Ususan Pemerintahan Bidang Perputakaan Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei	N/A	88,5	N/A	88,5	88,5	Nilai
		7	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang diimpikan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Ususan Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Olahraga; Ususan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Ususan Pemerintahan Bidang Perputakaan; Ususan Pemerintahan Bidang Keasipaan; Ususan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Ususan Pemerintahan Bidang Sosial Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 54,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,05, atau nilai interval konversi 55,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam rangka mendukung Bidang Ususan Pemerintahan Bidang Keasipaan. Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei	N/A	88,5	N/A	88,5	88,5	Nilai

		8	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang diimpikan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Ususan Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Olahraga; Ususan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Ususan Pemerintahan Bidang Perputakaan; Ususan Pemerintahan Bidang Keasipaan; Ususan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Ususan Pemerintahan Bidang Sosial Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 54,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,05, atau nilai interval konversi 55,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam rangka mendukung Bidang urusan Kepegawaian Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei	N/A	88,5	N/A	88,5	88,5	Nilai
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang diimpikan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Ususan Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Olahraga; Ususan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Ususan Pemerintahan Bidang Perputakaan; Ususan Pemerintahan Bidang Keasipaan; Ususan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Ususan Pemerintahan Bidang Sosial Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 54,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,05, atau nilai interval konversi 55,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam rangka mendukung Bidang ususan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei	N/A	88,5	N/A	88,5	88,5	Nilai

		10	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Ususan Pemeliharaan Bidang Keperawatan Dan Obagreg; Ususan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Ususan Pemerintahan Bidang Pengapalaan; Ususan Pemerintahan Bidang Keasripan; Ususan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Ususan Pemerintahan Bidang Sosial Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,56; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei Indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai interval IKM) dalam rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Sosial Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei	N/A	88,5	N/A	88,5	88,5	Nilai
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Ususan Pemerintahan Bidang Keperawatan Dan Obagreg; Ususan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Ususan Pemerintahan Bidang Pengapalaan; Ususan Pemerintahan Bidang Keasripan; Ususan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Ususan Pemerintahan Bidang Sosial Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,56; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei Indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai interval IKM) dalam rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei	N/A	88,5	N/A	88,5	88,5	Nilai
3	Berkembangnya Koperasi, Profesionalitas, dan Iktan Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
4	Berkembangnya Kembangkan Serta Terjenninya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100	100	100	100	Persen
5	Meningkatnya Kecepatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	N/A	N/A	100	100	100	Persen
6	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	100	100	100	100	100	Persen
7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	N/A	100	N/A	100	100	Persen
8	Tercapainya Perubahan Manajemen dan Struktur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Pemajuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Pemajuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
Sasaran Khusus											
9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat keajutan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah provinsi DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan keucapan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK: WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMT=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat

10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan dalam tahun, capaian, dan laporan (dikalikan untuk gaji, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemasintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
11	Terlengkapinya rencana strategi komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau akivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PO menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PO menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PO menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PO mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau akivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
12	Tewujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektoral (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
13	Meningkatnya Pengelolaan Anasir pada Perangkat Daerah	1	Persentase Anasir Aktif dalam Daftar Anasir Aktif	e-Kinerja	Definisi : Tereaksinya Pembuatan Daftar Beras dan Daftar Isi Beras pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Keasipan (UK). Pengelolaan Anasir Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Susunan Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Rencana Target berupa Laporan Daftar Beras dan Daftar Isi Beras dari Seluruh Eselon II/Eselon. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta anasir yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua anasir yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anasir di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Raglan/Idang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Keasipan adalah satuan kerja pada pencipta anasir yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan keasipan. Unit Keasipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur Badan/Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja/Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat/Biro Umum Dasar Hukum: 1. Peraturan-RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Keasipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Anasir Dinamis Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Keasipan (UK) II di bagi jumlah Unit Pengolah (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PO (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusannya dan ditambahkan ke Dinas Perputakaan dan Keasipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditambahkan ke Dinas Perputakaan dan Keasipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

14	Tewujudnya tata kelola SD yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Beras dan Daftar Isi Beras Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Beras dan Daftar Isi Beras Tahun 2021 periode Juli s.d. Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Beras dan Daftar Isi Beras Tahun 2022 Periode Januari s.d. Desember. Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah ditetapkan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Formula Pengukuran : (Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut) x 100% Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengumpulan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Survei Gubernur No. 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atau Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi: Survei atau Kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana terdapat dalam Survei Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Formula Pengukuran: Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei	92	N/A	92	N/A	92	Nilai
16	Tereaksinya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing POLUKPD	e-Kinerja	Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang M3x Daerah pada POLUKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PO dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang telah diinventarisasi adalah: 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. Penghitungan: 1. Persiapan 10% a. Bobot 5%: POLUKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: POLUKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% a. Bobot 75%: POLUKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5%: POLUKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: POLUKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: POLUKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	N/A	10%	65%	100%	100%	Persentase

17	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kwayiban foto team dari penanggung SPP/PP/PT/PPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	e-Kinerja	Jumlah BAST (Benda Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 yang selesai diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100% Target: Kepulauan Seribu : 1 BAST Kota Administrasi Jakarta Utara : 70 BAST Kota Administrasi Jakarta Barat : 115 BAST Kota Administrasi Jakarta Pusat : 46 BAST Kota Administrasi Jakarta Timur : 42 BAST Kota Administrasi Jakarta Selatan : 126 BAST Dasar Hukum : Peraturan Menteri 12 Tahun 2020 Keputusan Nomor 915 Tahun 2020	N/A	15%	30%	100%	100%	Persentase
18	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancangan bangun dan penyelesaian yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (jail dedare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPU) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah). Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) PSN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPSD Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembudayaan Industri 2. Iptek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyelenggarakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
19	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. DEFINISI : Terselenggaranya Penuhannya pengembangan kompetensi 20 JP per tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
20	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. DEFINISI : Terselenggaranya Penuhannya pengembangan kompetensi 20 JP per tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Formula Pengukuran : (Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Tahunan 4) x 100% Sumber Data : Simdiklat BPSDM	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
21	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
22	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	DEFINISI : Terselenggaranya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://kms-ppnmd.jakarta.go.id METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Tahunan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Tahunan 4). SUMBER DATA : https://kms-ppnmd.jakarta.go.id Dasar Hukum : 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SI-Perisa) 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan diuraikan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko. Formula Pengukuran : (Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh inspektori) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Tahunan 4) x 100% Output Sasaran: 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko. Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh inspektori: Tahapan I : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal Tahapan II : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase

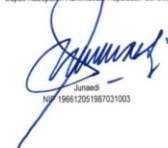
				2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Tirafan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko Metode Pengukuran : Tersaji dokumen-dokumen implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Tirafan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); Tirafan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan kontrol Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Tirafan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat							
23	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek implementasi	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 150 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja anggaran penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e-SANIP 2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyek APBD/ proyek sipbpt jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran sebanarnya dengan pengeluaran sebatasnya. - Pengeluaran sebanarnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebatasnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. b. pagu anggaran dari sumber data proyek APBD, dan c. realisasi anggaran sumber data proyek APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyek APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bdk = 43,9% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran	NA	NA	NA	71%	71%	Pesen

				BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bdk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 ≤ 70 = cukup > 70 ≤ 90 = Baik > 90 ≤ 100 = Sangat Baik								
Sasaran Operasional												
24	Terselenggaranya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi Tl Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah Tl Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Person
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi Tl Aduan Masyarakat dibagi Jumlah Tl Aduan Masyarakat dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Person
26	Terselenggaranya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2025 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasi / jumlah sisa rekomendasi yang belum diindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2025 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	25%	100%	Person

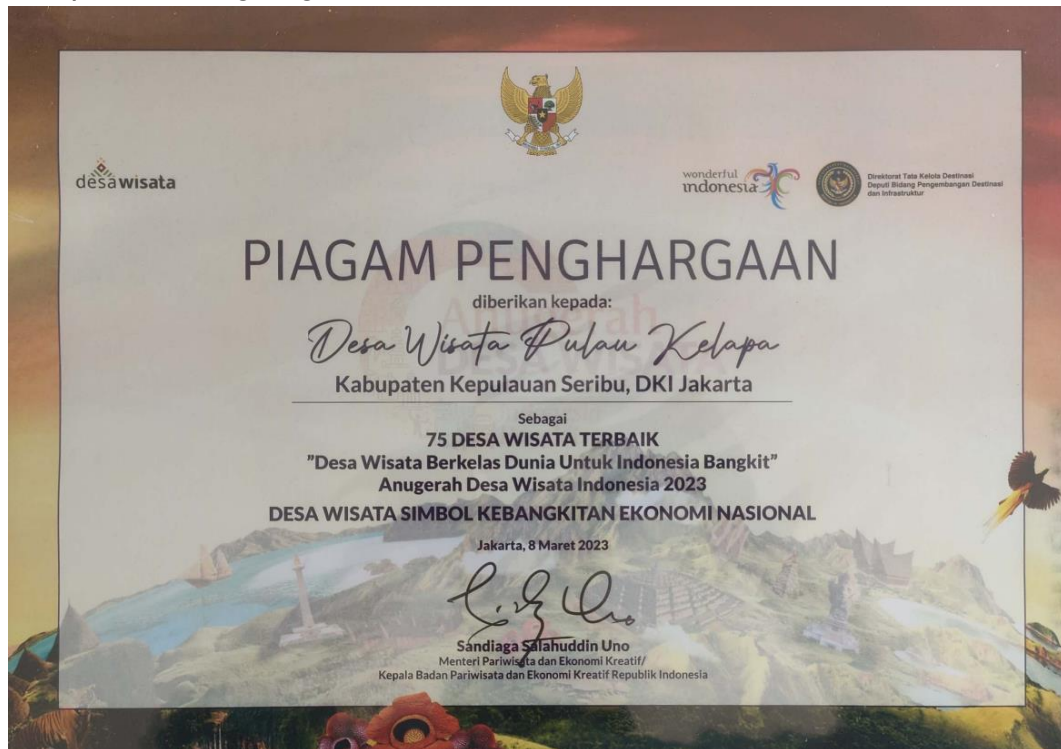
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,


Heru Budi Hartono

Jakarta,
Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,


Junardi
NIP. 196612051987031003

Lampiran 2 Penghargaan Desa Wisata Terbaik



Lampiran 3 Penghargaan Masyarakat Anti Pungutan Liar Indonesia



Lampiran 4 Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023



Lampiran 5 Performa Stan Flona terbaik



Lampiran 6 Program Jaminan Kesehatan Nasional



Lampiran 7 Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 Kategori Nindya dari Kementerian PPPA RI

